



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NAGEKEO**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NAGEKEO
MENURUT PENGELUARAN**

2019-2023

KATALOG 9302023.5318



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NAGEKEO
MENURUT PENGELUARAN**

2019-2023

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NAGEKEO
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023**

ISBN : -
Nomor Katalog : 9302023.5318
Nomor Publikasi : 53180.24003
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 69 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

Diterbitkan oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NAGEKEO
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023**

ISBN : -
Nomor Katalog : 9302023.5318
Nomor Publikasi : 53180.24003
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 69 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

Diterbitkan oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

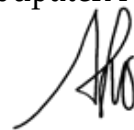
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar, pendalaman sektor keuangan, penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas.

Mbay, April 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Nagekeo,



Angela Regina Maria Wea, S.ST., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB.....	6
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	11
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT).....	13
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT).....	15
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P).....	17
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	20
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI).....	23
2.6 EKSPOR - IMPOR.....	26
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN NAGEKEO MENURUT PDRB PENGELUARAN 2015 -2019.....	27
3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN.....	29
3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN.....	37
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	37
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT.....	39
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah.....	40
3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	42
3.2.5. Perubahan Inventori.....	43
3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa.....	44
3.2.7. Impor Barang dan Jasa.....	45
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN NAGEKEO 2019-2023.....	47
4.1 PDRB (NOMINAL).....	49
4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB.....	48
4.3 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN.....	49
4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR).....	52
BAB V PENUTUP.....	53
LAMPIRAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023	30
Tabel 2.	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	31
Tabel 3.	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	34
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	36
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023 ..	36
Tabel 6.	Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	38
Tabel 7.	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Nagekeo Tahun 2015-2019.....	39
Tabel 8.	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023	40
Tabel 9.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	39
Tabel 10.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023	43
Tabel 11.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	44
Tabel 12.	Perkembangan Ekspor Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	45
Tabel 13.	Perkembangan Impor Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023	46
Tabel 14.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023	49
Tabel 15.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	50
Tabel 16.	Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023....	49
Tabel 17.	Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023	30
Grafik 2.	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	32
Grafik 3.	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	33
Grafik 4.	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	35

<https://nagekeokab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023	59
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023	58
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	59
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	60
Lampiran 5	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	61
Lampiran 6	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023.....	62
Lampiran 7	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023	63
Lampiran 8	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023	64

BAB 1

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDRB)

PDRB

LAPANGAN USAHA

PENGELUARAN

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian suatu wilayah.

PDRB pengeluaran menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (product) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi

RUMUS PDRB PENGELUARAN

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

KETERANGAN

Y (Income).	= PDRB Produksi
C (Consumption)	= Konsumsi Akhir
GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Meski demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

BAB 2

CAKUPAN DATA PDRB PENGELUARAN

PK - Rumah Tangga

01

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi

PK - LNPRT

02

Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi

PK - Pemerintah

PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri

03

PMTB

04

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu

Perubahan Inventori

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi)

05

Ekspor - Impor

06

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri)



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

- 1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
- 2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
- 3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
- 4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
- 5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
- 6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = & \text{Output} - \\ & \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ & \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ & \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

<https://nagekeokab.bps.go.id>

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;

3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : $\text{PMTB atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi : $\text{PMTB atas dasar harga Konstan (t)} = \text{PMTB atas dasar harga (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$

<https://nagekeokab.bps.go.id>

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/ BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume nventori (t) - Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metode Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

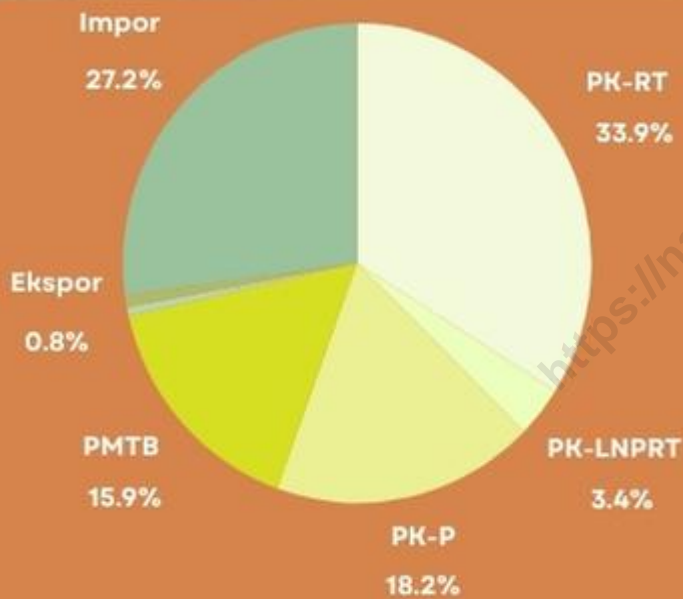
Tinjauan Ekonomi Kabupaten Nagekeo

2,67
TRILIUN RUPIAH

PDRB Nagekeo atas dasar harga berlaku pada tahun 2023

PDRB Nagekeo atas dasar harga konstan pada tahun 2023

1,50
TRILIUN RUPIAH

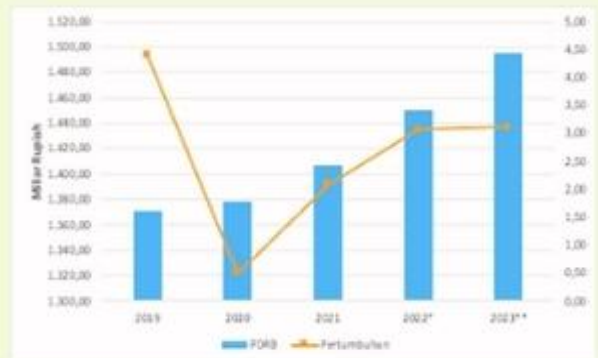


DISTRIBUSI PDRB ADHB

Dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Nagekeo atas dasar harga berlaku, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) sebesar 33,9%. Dilanjutkan oleh Impor yang mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah (impor).

PERTUMBUHAN PDRB ADHK

Sedangkan atas dasar harga konstan, PDRB Kabupaten Nagekeo terus meningkat, yakni dari 1,37 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 1,50 triliun rupiah pada tahun 2023 walaupun pertumbuhannya sempat menurun di tahun 2020.



3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung mengalami kondisi yang cukup beragam. Pada tahun sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi kabupaten selalu mencapai sekitar 4 persen, yaitu 4,75 persen pada 2018 dan 4,40 persen pada 2019. Di tahun pandemi 2020 terjadi perlambatan laju pertumbuhan, masih tetap bertumbuh hanya pertumbuhannya terbatas pada angka 0,49 persen. Laju pertumbuhan kembali mulai pulih di tahun berikutnya yaitu 2,08; 3,07; dan 3,12 persen berturut-turut. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*).

Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo ditopang pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) yang pada tahun 2023 menyumbang 74,31 persen terhadap pertumbuhan total PDRB menurut harga berlaku. Berikutnya diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah yang sebesar 39,77 persen.

Pada periode tahun 2019-2023 PDRB Kabupaten Nagekeo atas dasar harga berlaku tidak mengalami peningkatan yang terlalu signifikan di 2023, meski di tahun-tahun sebelumnya meningkat cukup signifikan, yakni nilainya sebesar 2.241,37 miliar rupiah (2019); 2.271,91 miliar rupiah (2020); 2.347,31 miliar rupiah (2021); 2.487,14 miliar rupiah (2022); dan 2.669,96 miliar rupiah (2023). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Nagekeo pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 1 dan Grafik 1.

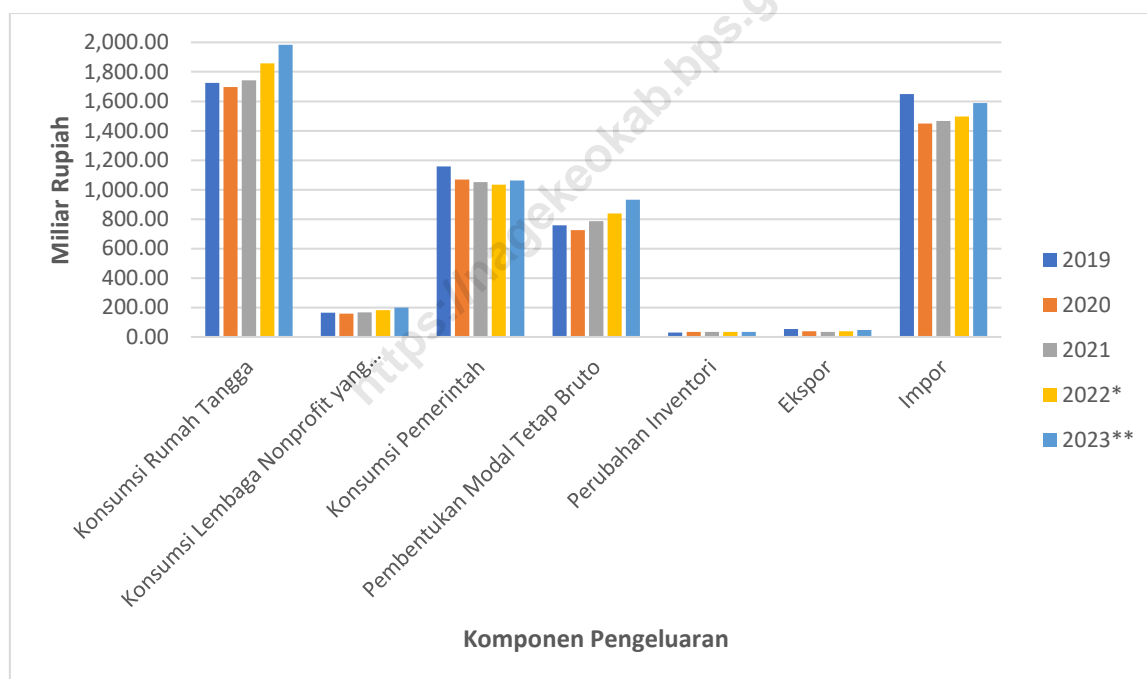
Tabel 1 dan Grafik 1 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Nagekeo ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara komponen perubahan inventori, pembentukan modal tetap bruto dan ekspor pengaruhnya tidak begitu besar terhadap perekonomian kabupaten Nagekeo. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pola konsumsi rumah tangga dapat menyebabkan perubahan yang besar pada kondisi perekonomian.

Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.724,72	1.695,88	1.741,34	1.856,56	1.984,11
2. Konsumsi LNPRT	158,16	158,17	166,80	182,03	199,87
3. Konsumsi Pemerintah	1.157,68	1.068,74	1.051,75	1.034,45	1.061,90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	758,23	725,68	785,28	837,67	931,01
5. Perubahan Inventori	30,82	33,46	34,66	34,67	33,85
6. Ekspor	54,80	38,46	34,89	38,40	46,51
7. Impor	1.648,48	1.448,49	1.466,41	1.496,63	1.587,29
Total PDRB	2.241,37	2.271,91	2.347,31	2.487,42	2.669,96

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau

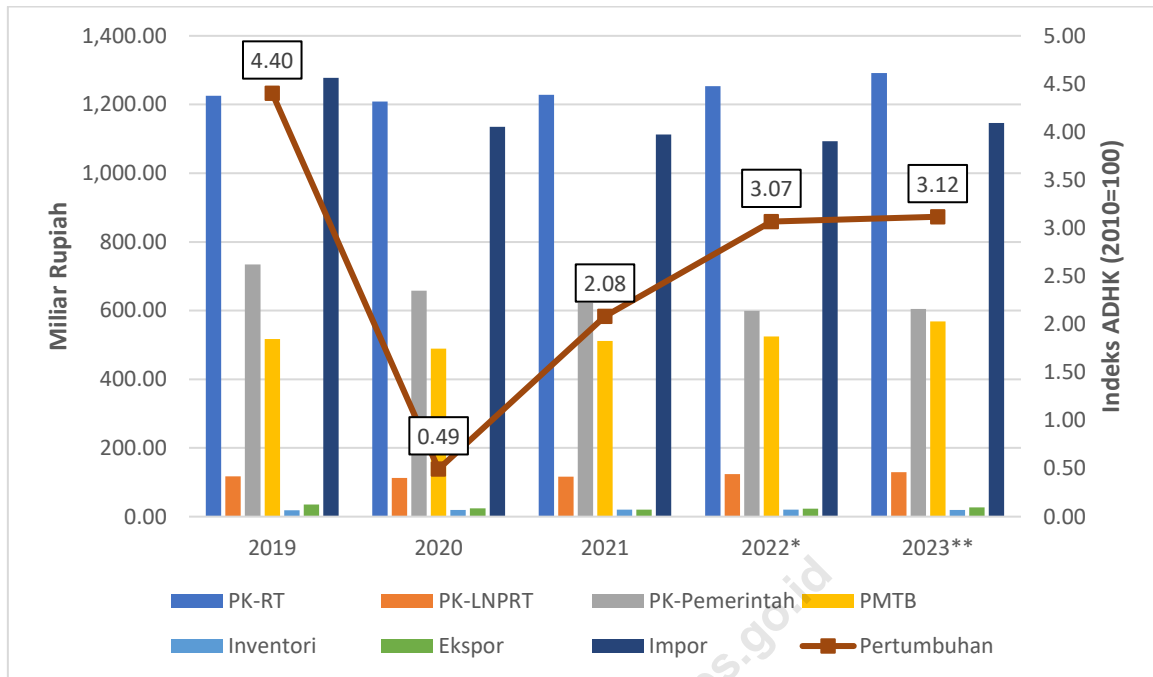
konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Nagekeo pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 2 dan Grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

Komponen Pengeluaran (1)	(Miliar Rp)				
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022* (5)	2023** (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.225,59	1.208,72	1.228,19	1.253,29	1.291,87
2. Konsumsi LNPRT	117,35	112,95	116,58	123,45	129,76
3. Konsumsi Pemerintah	734,36	657,95	632,56	609,23	604,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	517,41	488,81	511,48	524,46	568,59
5. Perubahan Inventori	18,34	19,89	20,05	20,01	19,46
6. Ekspor	35,64	24,42	20,75	22,79	26,91
7. Impor	1.277,44	1.134,69	1.112,87	1.093,34	1.146,45
Total PDRB	1.371,27	1.378,04	1.406,75	1.450,12	1.495,10

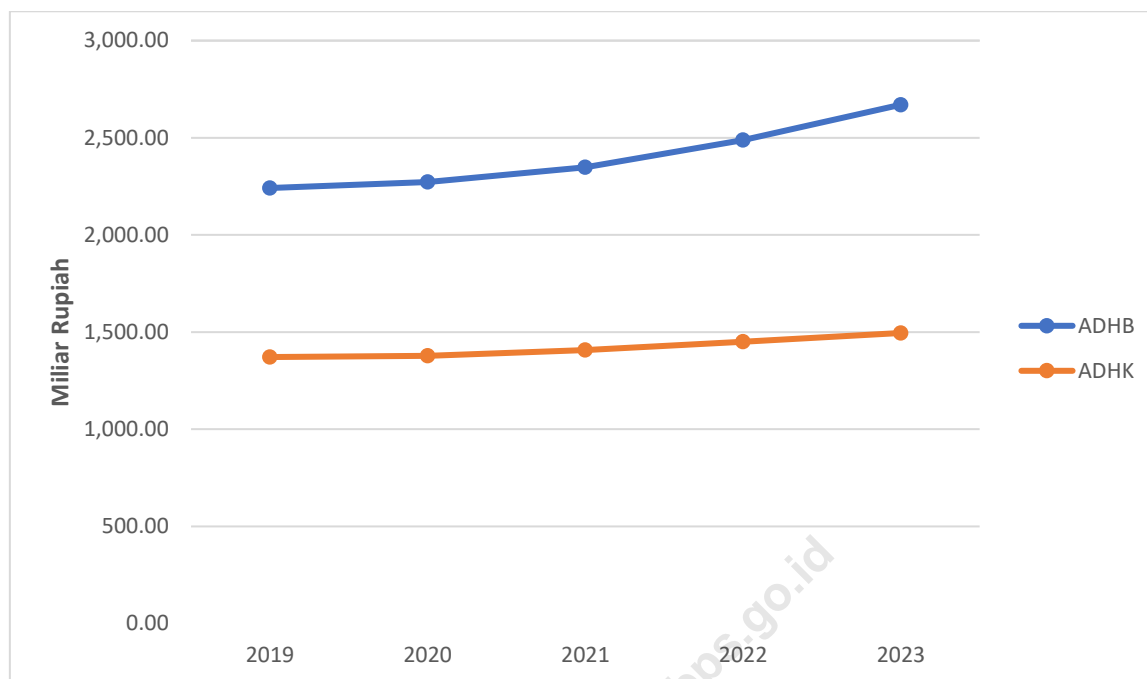
*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023



Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Nagekeo terus meningkat, yakni dari 1.371,27 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 1.495,10 miliar rupiah pada tahun 2023. Sedangkan dari Grafik 2, terlihat bahwa indeks ADHK (2010=100) mengalami kenaikan tahunan pada kisaran 4 persen, namun setelah pandemi terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi yaitu hanya sebesar 0,49 persen dan mengalami perbaikan laju kembali di tahun 2021 dan 2022 dengan angka 2,08 dan 3,07 persen berturut-turut hingga akhirnya mencapai angka pertumbuhan sebesar 3,12 persen di tahun 2023.

Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023



Dari Grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut dipengaruhi baik oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan sehingga dapat dimaknai sebagai peningkatan kapasitas produksi. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

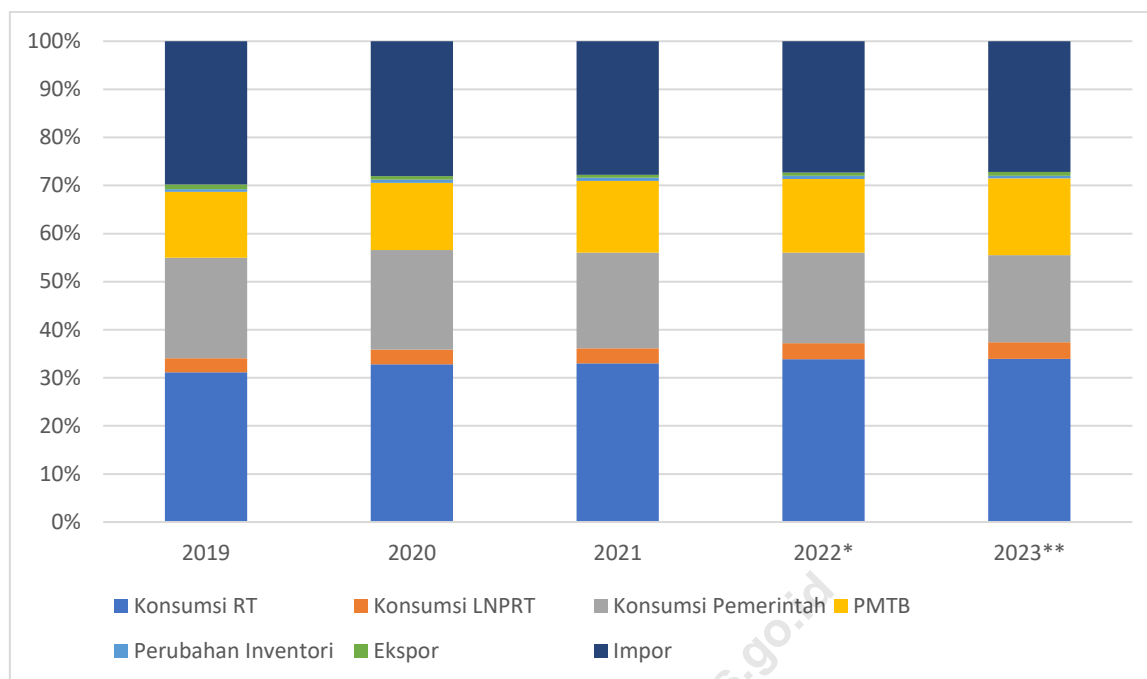
Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	76,95	74,65	74,18	74,65	74,31
2. Konsumsi LNPRT	7,30	6,96	7,11	7,32	7,49
3. Konsumsi Pemerintah	51,65	47,04	44,81	41,59	39,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,83	31,94	33,45	33,68	34,87
5. Perubahan Inventori	1,37	1,47	1,48	1,39	1,27
6. Ekspor	2,45	1,69	1,44	1,54	1,74
7. Impor	73,55	63,76	62,47	60,17	59,45
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI) dan Ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2019-2023, PDRB Kabupaten Nagekeo, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk konsumsi pemerintah (PK-P) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 39 hingga 52 persen. Di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 59 hingga 74 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023



Kontribusi komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berada pada rentang 31-35 persen. Di sisi lain, selama periode 2019-2023 perdagangan antar wilayah menunjukkan nilai ekspor yang selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Kecenderungan pada periode itu menunjukkan posisi “defisit” transaksi berjalan.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 4, selama periode tahun 2019-2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo mengalami fluktuasi, yakni dari sebesar 4,75 hingga 0,49 persen.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	3,08	-1,38	1,61	2,04	3,08
Konsumsi LNPRT	4,97	-3,75	3,22	5,89	5,11
Konsumsi Pemerintah	2,31	-10,41	-5,38	-3,75	0,96
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,49	-5,53	4,64	2,54	8,41
Perubahan Inventori	8,91	8,44	0,81	-0,21	-2,76
Ekspor	-9,24	-31,47	-15,06	9,86	18,06
Impor	0,90	11,17	-1,92	-1,76	4,86
Total PDRB	4,40	0,49	2,08	3,07	3,12

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	138,10	140,73	141,78	148,13	153,58
Konsumsi LNPRT	135,14	139,40	143,07	147,45	154,04
Konsumsi Pemerintah	157,19	157,64	168,94	172,63	175,53
Pembentukan Modal Tetap Bruto	143,91	146,54	153,53	159,72	163,74
Perubahan Inventori	164,88	167,99	172,83	173,24	173,94
Ekspor	152,39	153,78	163,35	168,46	172,84
Impor	129,01	129,05	131,77	136,89	138,45
Total PDRB	163,45	160,04	166,86	171,54	178,58

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit⁶ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) menunjukkan peningkatan. Secara kumulatif kenaikan harga PDRB yang terjadi sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2023 adalah sebesar 78,58 persen.

⁶ Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Nagekeo untuk periode 2019-2023.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Nagekeo, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Nagekeo maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019-2023 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
a. ADHB	1.724,72	1.695,89	1.741,34	1.856,56	1.984,11
b. ADHK (2010)	1.225,59	1.208,72	1.228,19	1.253,29	1.291,87
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	76,95	74,65	74,18	74,65	74,31
Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	11.827,28	10.654,42	10.783,78	11.338,12	11.947,94
b. ADHK 2010	8.404,48	7.593,78	7.605,92	7.653,94	7.779,42
Pertumbuhan ⁷					
a. Total konsumsi Rumah Tangga	3,08	-1,38	1,61	2,04	3,08
b. Perkapita	2,08	-9,65	0,16	0,63	1,64
Jumlah penduduk (ribu orang) ^{***}	145,83	159,17	161,48	163,75	166,06

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

*** Jumlah penduduk 2018-2019 hasil proyeksi SP2010. Penduduk 2020-2022 hasil SP2020

Selama periode 2019-2023 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB sangat dominan, yaitu berkisar antara 74 persen sampai dengan 77 persen. Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 76,95 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 74,18 persen.

Dengan kondisi perekonomian yang terus bertumbuh, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini mendorong naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara "riil" meningkat pada sebelum adanya pandemi. Saat pandemi konsumsi mengalami penurunan tajam sebesar -1,38 persen kemudian meningkat dengan lambat di tahun berikutnya menjadi 1,61 dan 2,04 persen kemudian meningkat lagi hingga 3,08 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023⁸
(Persen)

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	31,83	32,15	33,33	33,80	33,63
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,99	3,26	2,55	2,47	2,37
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,54	12,91	12,57	12,36	12,09
d. Kesehatan & Pendidikan	6,73	7,14	7,19	6,56	6,34
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	17,40	15,57	15,25	16,00	16,35
f. Hotel & Restoran	2,70	1,90	1,77	1,78	1,78
g. Lainnya	1,77	1,72	1,52	1,68	1,74
Total Konsumsi rumah Tangga	76,95	74,65	74,18	74,65	74,31

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata, dari tahun 2019 sampai dengan 2023, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Nagekeo bahwa konsumsi bukan makanan masih lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cukup stagnan selama periode 2019-2023, yaitu berkisar antara 31 persen sampai 34 persen.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut diantaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2019 konsumsi LNPRT sebesar 163,58 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 158,17 miliar rupiah (2020); 166,80 miliar rupiah (2021); 182,03 miliar rupiah (2022); dan 199,87 miliar

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

rupiah (2023). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 relatif bervariasi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh pola kegiatan lembaga non profit yang melayani rumah tangga.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	163,58	158,17	166,80	182,03	199,87
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	117,35	112,95	116,58	123,45	129,76
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	7,30	6,96	7,11	7,32	7,49
Pertumbuhan (ADHK 2010)	4,97	-3,75	3,22	5,89	5,11

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.157,68	1.068,74	1.051,75	1.034,45	1.061,90
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	734,36	657,95	622,56	599,23	604,96
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	51,65	47,04	44,81	41,59	39,77
Konsumsi Pemerintah per kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	7.938,79	6.714,40	6.513,25	6.317,43	6.394,59
b. ADHK 2010	5.035,89	4.133,57	3.855,41	3.659,54	3.642,94
Konsumsi Pemerintah per pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	345.267,49	315.449,78	315.082,62	304.518,10	318.794,46
b. ADHK 2010	219.017,08	194.199,77	186.508,01	176.400,37	181.614,53
Pertumbuhan ⁹ (Persen)					
a. Total konsumsi pemerintah	2,31	-10,41	-5,38	-3,75	0,96
b. Konsumsi pemerintah per kapita	1,32	-17,92	-6,73	-5,08	-0,45
c. Konsumsi per pegawai pemerintah	-1,32	-11,33	-3,04	-3,33	3,12
Jumlah Pegawai Pemerintah ¹⁰	3.353	3.388	3.338	3.397	3.331
Jumlah penduduk (ribu org)	145,83	159,17	161,48	163,75	166,06

*** Jumlah penduduk 2017-2019 hasil proyeksi SP2010. Penduduk 2020-2023 hasil SP2020

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan penurunan hingga tahun 2022, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.157,68 miliar rupiah dan menurun menjadi 1.034,45 miliar rupiah pada tahun 2022, lalu meningkat kembali menjadi 1.061,90 miliar rupiah pada tahun 2023. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami penurunan pada setiap tahun hingga tahun 2022. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi penurunan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB terus menurun dari 51,65 persen di 2019 menjadi hanya sebesar 39,77 persen di 2023.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk,

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

¹⁰ Tidak termasuk polisi dan militer

baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 7,94 juta rupiah dan terus menurun pada tahun-tahun setelahnya hingga hanya mencapai 6,39 juta rupiah di 2023.

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya penurunan setiap tahunnya karena tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan laju pengeluaran pemerintah.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang menurun juga. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 345,27 juta rupiah, kemudian terus menurun pada tahun-tahun berikutnya (Tabel 9). Pada tingkat harga konstan 2010, indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu. Utamanya setelah pandemi, penurunan penganggaran konsumsi pemerintah terus menurun tiga tahun berturut-turut.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan penurunan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹¹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019-2023 fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 5,18 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu negatif sebesar -5,53 persen.

¹¹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Tabel 10. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	758,23	725,68	785,28	837,67	931,01
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	517,41	488,81	511,48	524,46	568,59
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	33,83	31,94	33,45	33,68	34,87
Struktur PMTB ¹²					
a. Bangunan (Miliar Rp)	452,84	410,83	452,29	477,94	556,49
Persentase (%)	59,72	56,61	57,60	57,06	59,77
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	305,39	314,85	332,99	359,73	374,52
Persentase (%)	40,28	43,39	42,40	42,94	40,23
Total PMTB (Miliar Rp)	758,23	725,68	785,28	837,67	931,01
Persentase (%)	100	100	100	100	100
Pertumbuhan ¹³ (%)					
a. Bangunan	7,79	-9,28	10,09	5,67	16,43
b. Non Bangunan	-0,34	3,10	5,76	8,03	4,11
Total PMTB	4,36	-4,29	8,21	6,67	11,14

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif stabil selama periode 2019-2023 (Tabel 10). Ditinjau dari sisi pertumbuhan subkomponen bangunan menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Pada tahun 2020, pertumbuhan subkomponen bangunan mengalami pertumbuhan negatif, sedangkan di tahun lain masih bisa mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan pada komponen non bangunan juga mengalami fluktuasi pertumbuhan namun tidak sampai mengalami pertumbuhan negatif untuk kelima tahun periode. Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya pembentukan kapital untuk menunjang pertumbuhan ekonomi belum terlaksana dengan baik dari waktu ke waktu.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	30,82	33,46	34,66	34,67	33,85
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	18,34	19,89	20,05	20,01	19,46
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	1,37	1,47	1,48	1,39	1,27

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis dengan rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2019 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 30,82 miliar rupiah, terus bertumbuh setiap tahunnya hingga angka 33,85 miliar pada 2023. Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Nagekeo berada sekitar 1,3 hingga 1,5 persen dari total PDRB.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Nagekeo, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 12. Perkembangan Ekspor Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	54,81	38,46	33,89	38,40	46,51
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	35,64	24,42	20,75	22,79	26,91
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	2,45	1,69	1,44	1,54	1,74
Pertumbuhan ¹⁴	-9,24	-31,47	-15,06	9,86	18,06

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2019-2023 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan penurunan. Pada tahun 2019 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 54,81 miliar rupiah dan terus menurun menjadi sebesar 33,89 miliar rupiah pada tahun 2021 lalu meningkat kembali menjadi 46,51 miliar rupiah pada tahun 2023. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang cenderung menurun dari 35,64 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 26,91 miliar rupiah pada tahun 2023.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Nagekeo. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi total konsumsi akhir domestik dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Nagekeo di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Nagekeo terhadap

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada Tabel 13 di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan secara pertumbuhan semenjak pandemi 2020. Dilihat dari distribusinya terhadap total PDRB pun nilai impor terus berkurang proporsinya dalam kurun tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 1.648,48 miliar rupiah dan mengalami penurunan nilai hingga menjadi sebesar 1.587,29 miliar rupiah pada tahun 2023. Sementara itu proporsi impor terhadap total PDRB memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2019 yang dengan rasio 73,55 persen hingga mencapai 59,45 persen pada tahun 2023 terhadap total perekonomian.

Tabel 13. Perkembangan Impor Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

U r a i a n	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1.648,48	1.448,49	1.466,41	1.496,63	1.587,29
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1.277,44	1.134,69	1.122,83	1.103,29	1.103,29
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	73,55	63,76	62,47	60,17	59,45
Pertumbuhan ¹⁵	0,90	-11,17	-1,92	-1,76	4,86

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

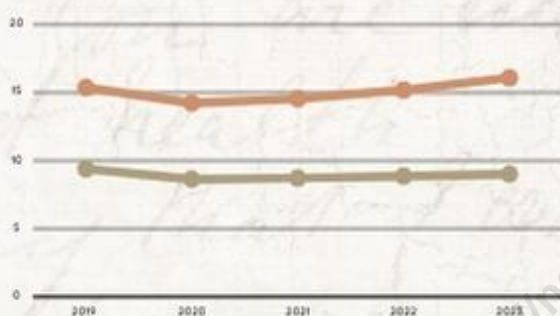
BAB 4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN

2,67
TRILIUN RUPIAH

PDRB Nagekeo atas dasar harga berlaku pada tahun 2023

PDRB PERKAPITA

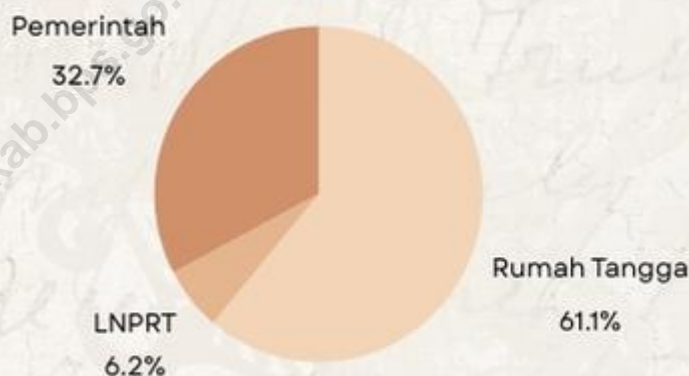


Secara umum, PDRB per kapita Kabupaten Nagekeo menunjukkan peningkatan setiap tahun, menunjukkan bahwa penduduk Nagekeo rata-rata mampu menciptakan PDRB sebesar nilai per kapita di setiap tahun tersebut

PDRB Nagekeo atas dasar harga konstan pada tahun 2023

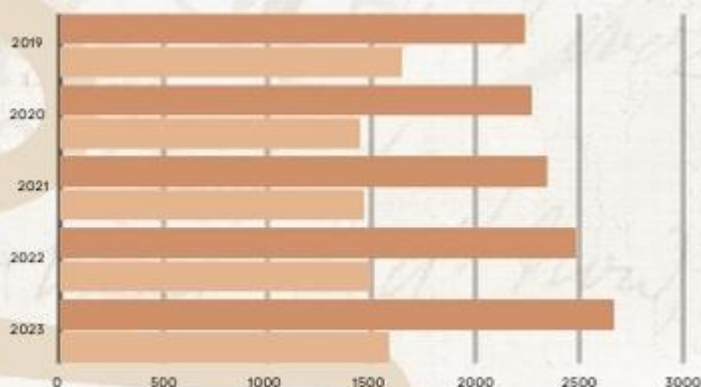
1,50
TRILIUN RUPIAH

PROPORSI KONSUMSI AKHIR



Pada tahun 2023, konsumsi akhir terbesar dilakukan oleh rumah tangga (PK-RT) dibandingkan LNPRT dan Pemerintah, yaitu sebesar 61,1%

KESEIMBANGAN PENYEDIAAN DAN PERMINTAAN



Nilai impor masih tergolong cukup besar sehingga dapat dikatakan bahwa produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Nagekeo, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Secara umum, PDRB per kapita Kabupaten Nagekeo menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Nagekeo rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” berada pada kisaran 3 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata 1,5 persen setiap tahunnya. Dengan demikian pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	2.241,37	2.271,91	2.347,31	2.487,14	2.669,96
- ADHK 2010	1.371,27	1.378,04	1.406,75	1.449,90	1.495,10
PDRB per kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	15.371	14.223	14.536	15.190	16.078
- ADHK 2010	9.404	8.627	8.712	8.855	9.003
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	2,48	-8,26	0,98	1,64	1,68
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	145,82	159,73	161,48	163,74	166,06
Pertumbuhan	1,88	9,54	1,10	1,40	1,42

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 15. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
Rumah tangga	1.724,73	1.695,89	1.741,34	1.856,56	1.984,11
LNPRT	163,58	158,17	166,80	182,03	199,87
Pemerintah	1.157,91	1.068,74	1.051,74	1.034,45	1.061,90
Jumlah (Miliar Rp)	3.045,99	2.922,80	2.959,89	3.073,03	3.245,89
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2.241,37	2.271,91	2.347,31	2.487,14	2.669,96
Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB (Persen)	135,90	128,65	126,10	123,56	121,57

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2023, produk (barang dan jasa) yang digunakan untuk konsumsi akhir, baik oleh rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah selalu lebih besar (lebih dari 100 persen) dibandingkan dengan nilai total PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku, yaitu rata-rata proporsi setiap tahunnya sebesar 127,15 persen. Hal ini berarti bahwa konsumsi akhir selalu lebih besar daripada produk yang dihasilkan oleh domestik sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir tersebut diperlukan produk impor dari luar wilayah.

4.3 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk barang dan jasa yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari Tabel 16, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik selama periode 2019-2023, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah Nagekeo, yaitu dengan rata-rata 38,92 persen setiap tahunnya. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 61,08 persen setiap tahunnya dari hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan akhir masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 3.889,84 miliar rupiah (2019) menjadi sebesar 4.257,26 miliar rupiah (2023).

Tabel 16. Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2.241,37	2.271,91	2.347,31	2.487,14	2.669,96
Persentase (Persen)	57,62	61,07	61,55	62,43	62,72
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	1.648,48	1.448,49	1.466,41	1.496,63	1.587,29
Persentase (Persen)	42,38	38,93	38,45	37,57	37,28
Total Permintaan Akhir (ADHB) (Miliar Rp)	3.889,84	3.720,40	3.813,72	3.983,77	4.257,26
Persentase (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 2.241,37 miliar rupiah (2019); 2.271,91 miliar rupiah (2020); 2.347,31 miliar rupiah (2021); 2.487,14 miliar rupiah (2022); dan 2.669,96 miliar rupiah (2023). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 1.648,48 miliar rupiah (2019); 1.448,49 miliar rupiah (2020); 1.466,41 miliar rupiah (2021); 1.496,63 miliar rupiah (2022); dan 1.587,29 miliar rupiah (2023).

4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah *output* (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan *output* adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap *output* atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai *output* (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar rupiah)	1.371,27	1.378,04	1.406,75	1.449,90	1.495,10
Perubahan (Miliar rupiah)	57,83	6,77	28,71	43,16	45,20
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	517,41	488,81	511,48	524,46	568,59
ICOR	8,95	72,13	17,82	12,15	12,58

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sebelum pandemi nilai ICOR Nagekeo stabil di angka 8 poin. Pada tahun 2020 nilai ICOR mencapai 72,20, angka yang tidak wajar kemungkinan besar disebabkan oleh adanya pandemi. Nilai ICOR sebesar 12,58 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa untuk menaikkan *output* (nilai keluaran) perekonomian setiap satu rupiah dibutuhkan tambahan investasi senilai 12,58 rupiah.

PENUTUP PDRB PENGELUARAN

menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Nagekeo pada periode bersangkutan

data berbentuk series dari tahun 2019-2023

menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah

data dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain

terdapat data tentang interaksi dengan luar daerah, yaitu ekspor dan impor



<https://nagekeokab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2019-2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Nagekeo pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2019-2023, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Nagekeo terhadap ekonomi luar daerah.



LAMPIRAN

<https://nagekeokab.bps.go.id>

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.724.724,96	1.695.885,95	1.741.343,90	1.856.560,04	1.984.110,62
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	713.342,00	730.334,47	782.302,93	840.529,27	898.012,75
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	89.438,81	74.029,49	59.954,81	61.366,98	63.328,47
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	280.957,88	294.396,24	295.117,79	307.404,97	322.847,96
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	150.765,02	161.202,78	168.761,66	163.248,33	169.367,20
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	390.091,83	353.810,31	358.066,23	398.009,29	436.608,34
1.f. Hotel dan Restoran	60.494,68	43.141,83	41.527,02	44.281,45	47.494,89
1.g. Lainnya	39.634,75	38.970,82	35.613,46	41.719,75	46.451,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	163.580,84	158.168,95	166.801,03	182.025,86	199.872,12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.157.681,90	1.068.743,84	1.051.745,78	1.034.447,99	1.061.904,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	758.229,82	725.679,87	785.277,75	837.666,73	931.007,79
4.a. Bangunan	452.844,15	410.829,33	452.286,80	477.935,10	556.490,81
4.b. Non-Bangunan	305.385,68	314.850,54	332.990,94	359.731,64	374.516,98
5. Perubahan Inventori	30.816,36	33.459,17	34.659,57	34.670,30	33.849,73
6. Ekspor	54.808,64	38.459,68	33.891,82	38.396,69	46.511,52
7. Impor	1.648.476,93	1.448.492,45	1.466.406,63	1.496.627,38	1.587.294,35
PDRB	2.241.365,60	2.271.905,01	2.347.313,22	2.487.140,23	2.669.961,80

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.225.591,51	1.208.716,90	1.228.188,10	1.253.293,81	1.291.873,64
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	436.246,22	441.205,26	453.393,57	464.378,18	476.144,79
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	53.017,47	41.947,74	33.844,18	34.529,25	35.510,08
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	230.491,16	239.850,15	243.571,15	249.910,50	258.077,25
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	107.421,51	116.462,57	124.961,08	118.994,37	120.413,06
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	342.183,27	322.758,57	329.032,44	339.207,58	353.119,54
1.f. Hotel dan Restoran	28.261,56	20.280,44	19.828,40	20.322,79	20.938,69
1.g. Lainnya	27.970,33	26.212,17	23.557,28	25.951,14	27.670,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	117.350,08	112.949,38	116.584,72	123.450,27	129.756,96
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	734.364,28	657.948,83	622.563,74	599.232,06	604.958,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	517.410,45	488.805,12	511.483,43	524.458,52	568.589,22
4.a. Bangunan	317.832,17	287.618,35	304.237,06	307.527,34	349.900,11
4.b. Non-Bangunan	199.578,27	201.186,76	207.246,37	216.931,18	218.689,11
5. Perubahan Inventori	18.344,31	19.892,60	20.054,48	20.012,85	19.460,80
6. Ekspor	35.641,32	24.424,94	20.747,51	22.792,88	26.910,02
7. Impor	1.277.435,58	1.134.694,64	1.112.872,42	1.093.335,69	1.146.447,33
PDRB	1.371.266,38	1.378.043,12	1.406.749,55	1.449.904,69	1.495.101,32

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	76,95	74,65	74,18	74,65	74,31
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	31,83	32,15	33,33	33,80	33,63
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,99	3,26	2,55	2,47	2,37
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	12,54	12,96	12,57	12,36	12,09
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,73	7,10	7,19	6,56	6,34
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	17,40	15,57	15,25	16,00	16,35
1.f. Hotel dan Restoran	2,70	1,90	1,77	1,78	1,78
1.g. Lainnya	1,77	1,72	1,52	1,68	1,74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,30	6,96	7,11	7,32	7,49
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	51,65	47,04	44,81	41,59	39,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,83	31,94	33,45	33,68	34,87
4.a. Bangunan	20,20	18,08	19,27	19,22	20,84
4.b. Non-Bangunan	13,62	13,86	14,19	14,46	14,03
5. Perubahan Inventori	1,37	1,47	1,48	1,39	1,27
6. Ekspor	2,45	1,69	1,44	1,54	1,74
7. Impor	73,55	63,76	62,47	60,17	59,45
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,08	(1,38)	1,61	2,04	3,08
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,85	1,14	2,76	2,42	2,53
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,79	(20,88)	(19,32)	2,02	2,84
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	7,26	4,06	1,55	2,60	3,27
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,31	8,42	7,30	(4,77)	1,19
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	(2,36)	(5,68)	1,94	3,09	4,10
1.f. Hotel dan Restoran	9,44	(28,24)	(2,23)	2,49	3,03
1.g. Lainnya	7,07	(6,29)	(10,13)	10,16	6,62
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,97	(3,75)	3,22	5,89	5,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,31	(10,41)	(5,38)	(3,75)	0,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,49	(5,53)	4,64	2,54	8,41
4.a. Bangunan	4,67	(9,51)	5,78	1,08	13,78
4.b. Non-Bangunan	(0,81)	0,81	3,01	4,67	0,81
5. Perubahan Inventori	8,91	8,44	0,81	(0,21)	(2,76)
6. Ekspor Luar Negeri	(9,24)	(31,47)	(15,06)	9,86	18,06
7. Impor Luar Negeri	0,90	(11,17)	(1,92)	(1,76)	4,86
PDRB	4,40	0,49	2,08	3,07	3,12

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 5 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	215,14	211,54	217,21	231,58	247,49
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	226,96	232,37	248,90	267,43	285,72
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	255,82	211,74	171,49	175,52	181,13
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	206,34	216,21	216,74	225,76	237,10
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	219,51	234,71	245,71	237,69	246,60
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	185,10	167,89	169,91	188,86	207,18
1.f. Hotel dan Restoran	390,26	278,31	267,90	285,66	306,39
1.g. Lainnya	185,79	182,68	166,94	195,56	217,74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	255,69	247,24	260,73	284,53	312,42
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	263,88	243,61	239,73	235,79	242,05
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	307,85	294,64	318,83	340,10	378,00
4.a. Bangunan	318,93	289,34	318,54	336,61	391,93
4.b. Non-Bangunan	292,77	301,84	319,23	344,87	359,04
5. Perubahan Inventori	76,48	83,04	86,02	86,05	84,01
6. Ekspor Luar Negeri	152,24	106,83	94,14	106,65	129,19
7. Impor Luar Negeri	232,28	204,11	206,63	210,89	223,66
PDRB	244,35	247,67	255,90	271,14	291,07

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 6 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	152,88	150,77	153,20	156,33	161,14
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	138,80	140,38	144,25	147,75	151,49
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	151,64	119,98	96,80	98,76	101,57
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	169,27	176,15	178,88	183,54	189,53
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	156,40	169,57	181,94	173,25	175,32
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	162,37	153,15	156,13	160,96	167,56
1.f. Hotel dan Restoran	182,32	130,83	127,92	131,10	135,08
1.g. Lainnya	131,11	122,87	110,43	121,65	129,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	183,43	176,55	182,23	192,97	202,82
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	167,39	149,97	141,90	136,59	137,89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	210,08	198,46	207,67	212,94	230,85
4.a. Bangunan	223,85	202,57	214,27	216,59	246,43
4.b. Non-Bangunan	191,33	192,87	198,68	207,97	209,65
5. Perubahan Inventori	45,53	49,37	49,77	49,67	48,30
6. Ekspor	99,00	67,84	57,63	63,31	74,75
7. Impor	180,00	159,89	156,81	154,06	161,54
PDRB	149,49	150,23	153,36	158,06	162,99

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 7 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	138,10	140,73	141,78	148,13	153,58
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	160,21	163,52	172,54	181,00	188,60
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	166,62	168,70	177,15	177,72	178,34
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	121,10	121,90	121,16	123,01	125,10
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	138,45	140,35	135,05	137,19	140,66
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	112,32	114,00	108,82	117,34	123,64
1.f. Hotel dan Restoran	211,70	214,05	209,43	217,89	226,83
1.g. Lainnya	139,85	141,70	151,18	160,76	167,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	135,14	139,40	143,07	147,45	154,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	157,19	157,64	168,94	172,63	175,53
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	143,91	146,54	153,53	159,72	163,74
4.a. Bangunan	138,35	142,48	148,66	155,41	159,04
4.b. Non-Bangunan	152,29	153,02	160,67	165,83	171,26
5. Perubahan Inventori	164,88	167,99	172,83	173,24	173,94
6. Ekspor Luar Negeri	152,39	153,78	163,35	168,46	172,84
7. Impor Luar Negeri	129,01	129,05	131,77	136,89	138,45
PDRB	160,04	163,45	166,86	171,54	178,58

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 8 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,90	(0,30)	1,05	4,48	3,68
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,06	1,23	4,24	4,90	4,20
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,24	4,61	0,38	0,32	0,35
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,66	0,69	(0,95)	1,52	1,70
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,37	(1,38)	(3,02)	1,58	2,53
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,50	(3,84)	(0,73)	7,82	5,38
1.f. Hotel dan Restoran	1,11	(0,62)	(1,55)	4,04	4,10
1.g. Lainnya	1,32	4,92	1,68	6,34	4,42
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,15	0,46	2,17	3,06	4,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,29	3,04	4,00	2,18	1,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,83	1,31	3,41	4,03	2,52
4.a. Bangunan	2,98	0,25	4,08	4,54	2,34
4.b. Non-Bangunan	0,48	2,28	2,67	3,21	3,27
5. Perubahan Inventori	1,88	0,13	2,75	0,24	0,40
6. Ekspor Luar Negeri	0,91	2,39	3,74	3,13	2,60
7. Impor Luar Negeri	0,03	(1,08)	3,22	3,88	1,14
PDRB	2,13	0,86	1,21	2,80	4,11

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara



DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NAGEKEO**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagekeo
Mbay-Flores-NTT 86472

Homepage: <https://nagekeokab.bps.go.id> E-mail: bps5318@bps.go.id